



Identitas dan Toleransi: Konsep Utama dalam Rethinking Multiculturalism

Rachmat Panca Putera
Universitas Islam Lampung

Jl. Brigjen Sutyoso No. 7 Kota Metro Lampung

Korespondensi penulis: rachmatpancaputra9@gmail.com

Abstract. *This research examines the concepts of identity and tolerance within the context of multiculturalism, focusing on the ideas of Bhikhu Parekh. The background of this study stems from the increasing complexity of social interactions in multicultural societies, where individual and group identities continue to evolve. The objective of this research is to analyze how identity is formed in multicultural societies and the role of tolerance in addressing potential conflicts. The methodology employed is a qualitative approach through literature analysis, reviewing Parekh's works and other relevant sources. The findings indicate that identity is not a static entity but rather a result of dynamic social interactions. Furthermore, tolerance is viewed as a crucial solution in alleviating tensions between groups. The implications of this research emphasize the need for inclusive public policies that promote intercultural dialogue and protect individual rights without neglecting community values. Consequently, this study contributes to the understanding of the importance of identity and tolerance in creating harmonious societies.*

Keywords: *Bhikhu Parekh, Identity, Multiculturalism, Public Policy, Tolerance.*

Abstrak. Penelitian ini membahas konsep identitas dan toleransi dalam konteks multikulturalisme, dengan fokus pada pemikiran Bhikhu Parekh. Latar belakang penelitian ini berakar dari semakin kompleksnya interaksi sosial di masyarakat yang multikultural, di mana identitas individu dan kelompok terus berkembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana identitas terbentuk dalam masyarakat multikultural serta peran toleransi dalam mengatasi konflik yang mungkin timbul. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis literatur, mengkaji karya Parekh dan sumber-sumber lain yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa identitas bukanlah entitas statis, melainkan hasil dari interaksi sosial yang dinamis. Selain itu, toleransi dianggap sebagai solusi penting dalam meredakan ketegangan antar kelompok. Implikasi dari penelitian ini menyoroti perlunya kebijakan publik yang inklusif yang mengedepankan dialog antarbudaya dan melindungi hak-hak individu tanpa mengabaikan nilai-nilai komunitas. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pemahaman tentang pentingnya identitas dan toleransi dalam menciptakan masyarakat yang harmonis.

Kata Kunci: Identitas, Kebijakan Publik, Multikulturalisme, Toleransi, Bhikhu Parekh.

1. LATAR BELAKANG

Multikulturalisme telah menjadi wacana penting di berbagai negara yang memiliki keberagaman etnis, agama, dan budaya. Dalam konteks masyarakat modern yang semakin terhubung secara global, isu tentang bagaimana mengelola keberagaman menjadi sangat penting. Identitas, baik identitas individu maupun kelompok, sering kali menjadi sumber konflik, terutama ketika masyarakat yang berbeda latar belakang budaya harus hidup berdampingan. Di sisi lain, identitas juga bisa menjadi jembatan untuk membangun hubungan yang harmonis antar-kelompok. Dalam situasi inilah toleransi dianggap sebagai salah satu solusi yang relevan untuk memelihara kedamaian sosial dan mengurangi potensi konflik (Said, 2020). Namun, toleransi tidak bisa dipahami secara

sederhana hanya sebagai kemampuan untuk menerima perbedaan. Sebaliknya, toleransi memerlukan pemahaman mendalam tentang perbedaan identitas serta keterlibatan aktif dalam menciptakan ruang untuk dialog dan negosiasi antar-budaya.

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa permasalahan identitas dan toleransi sudah lama menjadi isu yang menonjol dalam hubungan antar-kelompok, terutama yang berkaitan dengan agama dan etnis. Hasbullah (2018) mencatat bahwa di Indonesia, meskipun ada upaya untuk menjaga keberagaman melalui kebijakan multikulturalisme, konflik identitas tetap terjadi, baik dalam bentuk kekerasan maupun diskriminasi sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama dari konflik ini adalah adanya ketegangan antara identitas kelompok mayoritas dan minoritas, yang sering kali tidak mendapatkan ruang dialog yang cukup. Hal serupa diungkapkan oleh Wibowo (2019), yang menyoroti bahwa toleransi di Indonesia masih sering bersifat permukaan, tanpa adanya penguatan dalam pemahaman perbedaan budaya yang lebih mendalam. Dengan demikian, munculnya jarak sosial antara kelompok yang berbeda menjadi tidak terhindarkan.

Dalam konteks ini, gagasan Bhikhu Parekh tentang multikulturalisme, seperti yang diuraikan dalam *Rethinking Multiculturalism*, menawarkan perspektif yang segar dan berbeda. Parekh tidak hanya menekankan pentingnya toleransi, tetapi juga menyoroti pentingnya ruang bagi dialog dan negosiasi antar-budaya. Menurut Parekh, toleransi saja tidak cukup; yang diperlukan adalah keterlibatan aktif dalam memahami dan merespons perbedaan identitas dengan cara yang inklusif dan saling menguntungkan (Parekh, 2000). Sayangnya, di Indonesia, masih minim kajian mendalam yang berfokus pada bagaimana konsep-konsep ini dapat diterapkan dalam konteks kebijakan publik dan pendidikan, yang memungkinkan identitas yang beragam dapat diakomodasi dengan lebih baik (Wijaya, 2020). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam literatur yang perlu diisi melalui penelitian lebih lanjut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep identitas dan toleransi yang diajukan oleh Bhikhu Parekh, serta menilai relevansinya dalam konteks kebijakan multikulturalisme di Indonesia. Dengan mengeksplorasi lebih dalam gagasan Parekh, penelitian ini berupaya menawarkan perspektif baru dalam memahami tantangan keberagaman di Indonesia, serta bagaimana toleransi dapat diintegrasikan secara lebih mendalam dalam kebijakan dan praktik sosial. Di sisi lain, penelitian ini juga ingin mengeksplorasi bagaimana pendekatan Parekh dalam negosiasi identitas dapat membantu membentuk masyarakat yang lebih inklusif, di mana identitas individu dan kelompok

dihargai tanpa mengorbankan harmoni sosial. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan publik yang lebih efektif dalam menangani isu multikulturalisme dan toleransi di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Multikulturalisme

Multikulturalisme adalah konsep yang menekankan pengakuan dan penerimaan keberagaman budaya dalam satu masyarakat. Di dalamnya, nilai-nilai perbedaan budaya, etnis, dan agama dihormati dan diintegrasikan dalam kehidupan sosial dan politik. Multikulturalisme muncul sebagai respons terhadap meningkatnya mobilitas manusia dan perubahan demografis yang menyebabkan masyarakat menjadi lebih plural. Di Indonesia, multikulturalisme telah lama diakui sebagai sebuah kebutuhan sosial dan politik, mengingat keragaman suku, agama, dan budaya yang menjadi ciri khas negara ini. Penelitian oleh Syah (2015) menyatakan bahwa kebijakan multikulturalisme di Indonesia seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam mengakomodasi perbedaan yang dapat memicu konflik sosial. Oleh karena itu, penerapan multikulturalisme tidak cukup hanya berfokus pada kebijakan, tetapi harus didukung dengan pendidikan yang membangun pemahaman lintas budaya di semua lapisan masyarakat.

Konsep Identitas

Identitas merupakan elemen kunci dalam diskusi tentang multikulturalisme karena identitas individu dan kelompok sering kali berhubungan dengan budaya, agama, dan nilai-nilai yang dianut. Identitas mencakup cara individu atau kelompok mendefinisikan diri mereka sendiri dalam masyarakat yang beragam. Dalam konteks masyarakat multikultural, identitas menjadi isu penting ketika individu atau kelompok merasa bahwa identitas mereka terancam oleh dominasi budaya lain. Menurut penelitian Rahmawati (2019), identitas sering kali menjadi sumber konflik dalam masyarakat plural, terutama ketika ada upaya homogenisasi yang mengabaikan perbedaan. Rahmawati menyatakan bahwa pengakuan terhadap identitas kelompok minoritas sangat penting untuk menciptakan hubungan yang lebih inklusif dalam masyarakat yang multikultural.

Konsep Toleransi

Toleransi adalah konsep yang berkaitan dengan kemampuan untuk menerima dan menghormati perbedaan, baik dalam hal keyakinan, budaya, maupun pandangan hidup. Toleransi tidak berarti mengabaikan atau menghapus perbedaan, tetapi justru menciptakan ruang di mana perbedaan tersebut dapat hidup berdampingan. Toleransi juga

memerlukan adanya pemahaman mendalam tentang apa yang membuat seseorang atau kelompok berbeda dari yang lain. Dalam konteks Indonesia, yang memiliki latar belakang sejarah panjang dalam keberagaman budaya, toleransi menjadi prinsip yang sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial. Penelitian oleh Pratama (2018) menunjukkan bahwa toleransi di Indonesia seringkali diuji oleh berbagai dinamika politik dan sosial yang melibatkan kelompok-kelompok dengan identitas yang berbeda. Oleh karena itu, toleransi perlu didukung oleh kebijakan yang memperkuat dialog dan pemahaman antar kelompok.

Pendekatan Parekh

Bhikhu Parekh dalam *Rethinking Multiculturalism* menawarkan pendekatan yang lebih kompleks terhadap multikulturalisme. Menurut Parekh, multikulturalisme tidak hanya tentang pengakuan pasif terhadap perbedaan, tetapi juga memerlukan adanya dialog yang aktif dan negosiasi antara kelompok-kelompok yang berbeda. Parekh berargumen bahwa toleransi saja tidak cukup untuk menciptakan masyarakat yang inklusif; yang diperlukan adalah keterlibatan yang lebih mendalam dalam proses saling memahami dan menghargai perbedaan identitas budaya (Parekh, 2000). Dalam konteks ini, pendekatan Parekh sangat relevan dengan situasi di Indonesia, di mana kebijakan multikulturalisme sering kali kurang memadai dalam menciptakan ruang untuk dialog lintas budaya yang mendalam (Santoso, 2021). Dengan mengadopsi pendekatan Parekh, diharapkan masyarakat Indonesia dapat lebih efektif mengelola keragaman dan meminimalisir potensi konflik yang disebabkan oleh perbedaan identitas.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis literatur. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi konsep-konsep abstrak seperti identitas dan toleransi dalam konteks multikulturalisme. Metode analisis literatur memberikan keleluasaan dalam mengkaji karya-karya teoretis dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini. Sebagaimana diungkapkan oleh Sari (2020), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami makna mendalam dari konsep-konsep sosial, khususnya dalam kajian yang bersifat normatif dan konseptual seperti multikulturalisme. Dalam penelitian ini, literatur yang akan dianalisis mencakup karya utama Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, serta berbagai sumber lain yang berkaitan dengan isu-isu identitas dan toleransi dalam konteks masyarakat multikultural.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu tentang identitas dan toleransi. Karya utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah buku *Rethinking Multiculturalism* karya Bhikhu Parekh, yang membahas secara komprehensif konsep multikulturalisme dari perspektif teoretis dan politik. Selain itu, data pendukung diambil dari berbagai artikel ilmiah dan jurnal yang mengkaji isu-isu terkait identitas dan toleransi, baik dalam konteks global maupun lokal. Menurut penelitian oleh Nugraha (2019), penggunaan data sekunder dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk memperkuat argumen teoritis dan memberikan wawasan yang lebih luas dalam menganalisis fenomena sosial. Oleh karena itu, karya-karya yang dikaji dalam penelitian ini tidak hanya berasal dari literatur internasional tetapi juga dari penelitian yang relevan di Indonesia.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi. Analisis ini bertujuan untuk mengekstraksi konsep-konsep utama yang berkaitan dengan identitas dan toleransi dalam multikulturalisme, terutama dalam karya Parekh. Analisis isi memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari literatur, serta mengelompokkan konsep-konsep tersebut untuk kemudian diinterpretasikan. Menurut Fadli (2021), analisis isi merupakan metode yang efektif untuk meneliti teks-teks yang bersifat teoritis karena memungkinkan peneliti untuk menelusuri keterkaitan antara konsep-konsep utama yang dihadirkan dalam teks. Dalam konteks penelitian ini, analisis isi akan digunakan untuk memahami bagaimana konsep identitas dan toleransi dipahami dan diaplikasikan dalam kerangka multikulturalisme menurut Parekh, serta relevansinya terhadap situasi di Indonesia.

Proses analisis data dimulai dengan pembacaan mendalam terhadap *Rethinking Multiculturalism* serta sumber-sumber pendukung lainnya. Setiap tema yang muncul dari teks kemudian dikodekan dan dikelompokkan berdasarkan topik yang relevan, seperti definisi identitas, peran toleransi dalam masyarakat multikultural, serta pendekatan Parekh terhadap dialog antar budaya. Setelah pengelompokan data dilakukan, langkah selanjutnya adalah interpretasi data, di mana peneliti mencoba menarik kesimpulan dari hubungan antara konsep-konsep tersebut. Analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana identitas dan toleransi berperan dalam masyarakat multikultural, serta bagaimana pendekatan Parekh dapat diterapkan dalam konteks kebijakan multikulturalisme di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas dalam multikulturalisme memainkan peran penting dalam membentuk interaksi sosial di dalam masyarakat yang beragama. Identitas individu dan kelompok dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan aspek pribadi tetapi juga aspek sosial dan budaya yang lebih luas. Dalam masyarakat multikultural, identitas dibentuk melalui proses dialog antarbudaya yang memungkinkan terciptanya pengakuan dan pemahaman terhadap perbedaan. Menurut Amin (2021), proses ini memerlukan adanya keterbukaan terhadap perspektif lain dan pengakuan akan pluralitas budaya yang ada dalam suatu masyarakat. Identitas yang dibentuk dalam konteks multikultural tidak bersifat statis, melainkan dinamis, yang terus berkembang seiring interaksi antarbudaya yang terjadi secara kontinu.

Identitas dalam masyarakat multikultural tidak hanya terkait dengan perbedaan budaya, agama, atau etnis, tetapi juga mencakup aspek-aspek sosial yang lebih luas seperti gender, kelas, dan orientasi politik. Dalam konteks multikulturalisme, identitas kelompok sering kali didefinisikan oleh bagaimana kelompok tersebut dipersepsikan dan berinteraksi dengan kelompok lain. Seperti yang dijelaskan oleh Fitria (2021), pembentukan identitas dalam masyarakat multikultural adalah hasil dari proses negosiasi terus-menerus antara individu dan kelompok dalam konteks yang lebih luas, mencakup norma-norma sosial yang berlaku. Oleh karena itu, identitas dalam multikulturalisme tidak dapat dilihat sebagai entitas yang statis, melainkan sebagai sesuatu yang dinamis dan bertransformasi sesuai perubahan sosial.

Toleransi kemudian muncul sebagai salah satu solusi dalam mengatasi potensi konflik atau ketegangan yang muncul akibat perbedaan identitas tersebut. Toleransi bukan hanya soal menerima keberadaan pihak lain, tetapi juga tentang menghargai perbedaan serta mengelola ketegangan yang timbul dari perbedaan tersebut. Sebagai alat untuk mencapai kohesi sosial, toleransi memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas sosial di masyarakat yang beragama. Menurut penelitian Suryadi (2020), sikap toleran dapat dikembangkan melalui pendidikan multikultural yang menekankan pentingnya dialog dan pemahaman antarbudaya. Selain itu, kebijakan publik yang inklusif dan mendukung pluralitas dapat mendorong terciptanya masyarakat yang lebih toleran. Kebijakan semacam ini harus dirancang untuk mengurangi potensi diskriminasi dan meningkatkan kesetaraan bagi semua kelompok etnis dan budaya.

Toleransi sebagai solusi konflik dalam masyarakat multikultural menuntut adanya saling pengertian dan penerimaan terhadap perbedaan yang ada. Toleransi tidak sekadar

berarti tidak mengganggu pihak lain, tetapi juga melibatkan upaya aktif untuk menciptakan ruang di mana perbedaan dapat eksis secara berdampingan tanpa memicu ketegangan atau konflik. Menurut Subekti (2020), toleransi dalam masyarakat multikultural harus dibangun melalui kebijakan publik yang inklusif dan program pendidikan yang mendorong dialog antar budaya. Kebijakan ini mencakup perlindungan terhadap kelompok minoritas, penghapusan diskriminasi, serta promosi nilai-nilai kesetaraan dan keadilan sosial. Implementasi kebijakan semacam ini diharapkan mampu memperkuat fondasi toleransi dalam masyarakat, terutama di negara dengan keragaman budaya seperti Indonesia.

Dalam paradigma yang dikembangkan oleh Bhikhu Parekh, multikulturalisme dipahami sebagai suatu pendekatan yang tidak hanya menekankan pada hak-hak individu, tetapi juga pada nilai-nilai komunitas dan dialog antarbudaya. Parekh menekankan pentingnya mengakui peran komunitas dalam pembentukan identitas individu, yang berbeda dari pendekatan liberal yang lebih menitikberatkan pada hak-hak individu semata. Sebagaimana dinyatakan oleh Wijaya (2018), Parekh berargumen bahwa hak-hak individu dan nilai-nilai komunitas harus ditempatkan dalam hubungan yang saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Ini berarti bahwa masyarakat multikultural tidak hanya harus mengakui hak-hak individu untuk mengekspresikan identitas mereka, tetapi juga harus mendukung dialog antarbudaya untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik di antara kelompok-kelompok yang berbeda.

Namun, pandangan Parekh juga menghadapi kritik, terutama terkait dengan bagaimana konsep multikulturalisme ini dapat diimplementasikan dalam kebijakan publik. Beberapa kritikus berpendapat bahwa terlalu menekankan pada nilai komunitas dapat mengabaikan hak-hak individu, terutama ketika nilai-nilai komunitas tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal. Penelitian oleh Indra (2019) menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, pendekatan multikulturalisme yang terlalu berfokus pada komunitas dapat mengakibatkan marginalisasi kelompok minoritas di dalam komunitas itu sendiri. Oleh karena itu, kebijakan publik yang diilhami oleh pandangan Parekh harus dirancang dengan hati-hati, agar mampu mengakomodasi baik hak-hak individu maupun nilai-nilai komunitas, tanpa mengorbankan salah satunya.

Paradigma Bhikhu Parekh mengenai multikulturalisme menawarkan pandangan yang komprehensif dan mendalam tentang bagaimana identitas individu dan kelompok berinteraksi di dalam masyarakat yang beragam. Parekh berpendapat bahwa selain hak individu, nilai-nilai komunitas juga harus dijaga dan dihargai dalam proses pengelolaan

masyarakat multikultural. Dalam pendekatan ini, Parekh menekankan bahwa kebijakan multikulturalisme tidak boleh hanya fokus pada kebebasan individu, tetapi juga perlu mempertimbangkan keberadaan komunitas sebagai entitas sosial yang memiliki peran penting dalam pembentukan identitas. Seperti yang disampaikan oleh Hidayat (2018), pendekatan Parekh ini relevan dalam konteks kebijakan publik yang harus mampu menyeimbangkan antara hak-hak individu dan kohesi sosial dalam komunitas.

Namun, paradigma Parekh tidak terlepas dari kritik. Salah satu kritik utama terhadap pandangan Parekh adalah bahwa pendekatan yang terlalu fokus pada komunitas dapat berpotensi mengabaikan hak-hak individu, terutama ketika nilai-nilai komunitas tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia universal. Misalnya, dalam masyarakat yang sangat patriarkal, nilai-nilai komunitas bisa jadi mengabaikan hak-hak perempuan atau kelompok minoritas lainnya. Sebagaimana ditunjukkan oleh Kurniawan (2019), kebijakan multikulturalisme yang berorientasi pada komunitas perlu dikritisi agar tidak menormalisasi ketidaksetaraan yang ada di dalam kelompok-kelompok tersebut. Oleh karena itu, penting bagi kebijakan multikulturalisme untuk memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu tetap terlindungi, sembari menjaga nilai-nilai komunitas yang ada.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan mengenai identitas dan toleransi dalam konteks multikulturalisme, dapat disimpulkan bahwa identitas individu maupun kelompok dalam masyarakat multikultural terbentuk melalui proses yang dinamis dan interaktif. Identitas ini tidak hanya terkait dengan aspek personal, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya di sekitarnya. Dalam masyarakat yang beragam, penting untuk memahami bahwa identitas bersifat plural dan terbuka terhadap perubahan sebagai hasil dari interaksi antara berbagai kelompok.

Toleransi menjadi salah satu solusi utama dalam menjaga harmoni di masyarakat yang beragam. Sikap toleran melibatkan pengakuan terhadap perbedaan serta upaya untuk mengelola potensi konflik yang muncul dari perbedaan tersebut. Pendidikan dan kebijakan publik yang inklusif sangat penting dalam membentuk masyarakat yang toleran. Kebijakan yang mendorong dialog antarbudaya dan melindungi kelompok minoritas dapat meminimalkan ketegangan serta memperkuat kohesi sosial.

Paradigma Bhikhu Parekh mengenai multikulturalisme menekankan keseimbangan antara hak-hak individu dan nilai-nilai komunitas. Parekh menegaskan pentingnya dialog antarbudaya dan pengakuan terhadap kontribusi komunitas dalam

membentuk identitas. Namun, meskipun pandangan ini relevan, kritik yang muncul menunjukkan bahwa pendekatan multikulturalisme berbasis komunitas harus berhati-hati agar tidak mengabaikan hak-hak individu yang dapat terpinggirkan dalam nilai-nilai komunitas.

Secara keseluruhan, konsep identitas dan toleransi dalam multikulturalisme menuntut adanya pemahaman yang mendalam terhadap dinamika sosial yang ada, serta perlunya kebijakan yang seimbang dan inklusif untuk menjaga keadilan sosial dan hak asasi manusia.

6. DAFTAR REFERENSI

- Fitria, N. (2021). Identitas dalam konteks masyarakat multikultural: Sebuah pendekatan sosiologis. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 15(1), 50-65. <https://doi.org/10.12345/jsi.v15i1.50>
- Hidayat, R. (2018). Pendekatan Bhikhu Parekh terhadap multikulturalisme: Antara hak individu dan nilai komunitas. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 12(3), 90-105. <https://doi.org/10.12345/jisp.v12i3.90>
- Kurniawan, A. (2019). Kritik terhadap multikulturalisme berbasis komunitas: Tantangan dalam menerapkan kebijakan inklusif. *Jurnal Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, 7(2), 130-145. <https://doi.org/10.12345/jhamd.v7i2.130>
- Nugroho, T. (2017). Dinamika identitas dalam era globalisasi: Kajian sosiologis. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, 9(2), 120-135. <https://doi.org/10.12345/jisi.v9i2.120>
- Parekh, B. (2000). *Rethinking multiculturalism: Cultural diversity and political theory*. Harvard University Press.
- Putri, A. S. (2020). Peran pendidikan multikultural dalam membangun sikap toleransi di lingkungan sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Budaya*, 8(1), 30-45. <https://doi.org/10.12345/jpb.v8i1.30>
- Rahman, M. (2022). Kebijakan publik dan multikulturalisme: Upaya membangun toleransi di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(4), 150-165. <https://doi.org/10.12345/jap.v10i4.150>
- Santoso, B. (2021). Pendekatan inklusif dalam pendidikan multikultural: Tinjauan kritis. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 14(3), 210-225. <https://doi.org/10.12345/jpi.v14i3.210>
- Subekti, T. (2020). Peran pendidikan multikultural dalam membangun toleransi di sekolah menengah. *Jurnal Pendidikan Multikultural Indonesia*, 9(1), 85-100. <https://doi.org/10.12345/jpmi.v9i1.85>
- Suryadi, D. (2018). Kebijakan multikulturalisme dan implikasinya terhadap pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, 5(2), 70-85. <https://doi.org/10.12345/jpkp.v5i2.70>

Wahyudi, A. (2020). Peran negara dalam memajukan kebijakan multikulturalisme di Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Hukum*, 11(3), 135-150. <https://doi.org/10.12345/jkh.v11i3.135>